

TIPE PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN BOMBANA

Rahmat Hidayat ¹, Irawati ², Hasnidar ³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Correspondent author: rahmataufklarung09@gmail.com
Kolaka, 93564, Indonesia

Abstract

The role of women in politics in almost all countries experiences obstacles, especially in developing countries, with both structural and cultural constraints. The structural constraints referred to are the level of education, economy, work of housewives, child care, and kitchen work. This work is identified as a second-class job that is difficult to balance with men when it comes to involvement in the public sector. While cultural constraints are cultural factors that place women in a private space where they have to live at home, women are always perceived as serving the family. Bombana District is one of the areas with a high level of female voter turnout and abstention for female voters. This study aims to determine the type of female voter participation in the 2019 legislative elections in Bombana District. The method used in this research is descriptive qualitative. The types and sources of data in this study are using primary data and secondary data with observation data collection techniques, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the type of participation of female voters in the 2019 legislative elections in Bombana uses two types of participation, namely the type of passive participation and the type of golput participation.

Keywords: Legislative; Political Participation; Women

Abstrak

Peran perempuan dalam politik hampir di seluruh negara mengalami hambatan khususnya dinegara berkembang baik kendala struktural maupun kendala kultural. Kendala struktural yang dimaksud adalah tingkat pendidikan, ekonomi dan pekerjaan ibu rumah tangga, mengasuh anak dan pekerjaan dapur. Pekerjaan tersebut diidentikan sebagai pekerjaan kelas dua yang sulit berimbang dengan laki-laki jika berbicara soal keterlibatan di sektor publik. Sementara kendala kultural adalah faktor budaya yang menempatkan perempuan ke ruang privat yang harus tinggal dirumah, perempuan selalu dipersepsikan untuk mengabdikan terhadap keluarga. Kabupaten Bombana merupakan salah satu daerah yang tingkat partisipasi pemilih perempuan dan angka golput untuk pemilih perempuan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipe partisipasi pemilih perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bombana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipe partisipasi pemilih perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Bombana menggunakan dua tipe partisipasi yaitu tipe partisipasi pasif dan tipe partisipasi golput.

Kata Kunci: legislatif; Partisipasi politik; Perempuan

PENDAHULUAN

Aspek penting dari sebuah demokrasi yaitu adanya partisipasi politik. Menurut Budiardjo (2008) Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam politik, antara lain dengan jalan memilih Pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan publik (*public policy*) merupakan bentuk dari sebuah partisipasi politik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

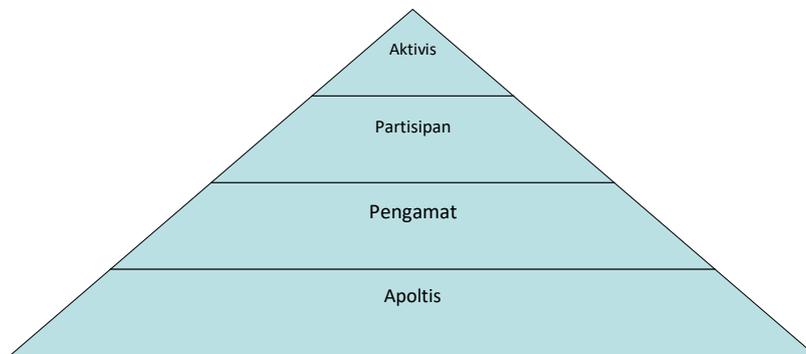
Teori tentang demokrasi, partisipasi politik dan pemilu sangatlah penting, sehingga partisipasi rakyat dalam politik adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan Fuad, Z, (2015). Kedudukan perempuan dalam dunia politik sangatlah penting Priandi & Roisah (2019). Bericara soal demokrasi partisipasi sangatlah penting termasuk partisipasi kaum perempuan. Peran perempuan di Indonesia bukan hal yang baru telah di mulai di zaman penjajahan. Munculnya tokoh-tokoh perempuan yang memberikan semangat bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam perpolitikan tanah air seperti R.A Kartini, R. Dewi Sartika dan Cut Nyak Dien dapat menjadi contoh nyata hadir perjuangan kaum perempuan di dunia perpolitikan yang sukses. Namun di lain sisi ada banyak hambatan yang dialami oleh kaum perempuan untuk tampil dan ikut terlibat di sektor publik .

Partisipasi perempuan dalam politik diberbagai negara menghadapi tantangan khususnya pada negara berkembang baik itu mengenai tantangan struktural maupun tantangan kultural. tantangan struktural yaitu masalah tingkat pendidikan, masalah ekonomi dan pekerjaan perempuan yang bergelut sebagai ibu rumah tangga, mengasuh anak dan pekerjaan dapur. Pekerjaan tersebut diidentikan sebagai pekerjaan kelas dua yang sulit berimbang dengan laki-laki jika berbicara soal keterlibatan di sektor publik. Sementara kendala kultural adalah faktor budaya yang menempatkan perempuan ke ruang privat yang harus tinggal dirumah, perempuan selalu dipersepsikan untuk mengabdikan terhadap keluarga Eddyono (2005) dan faktor agama bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi pemimpin.

Partisipasi politik Herbert McClosky dalam Budiardjo (2008) berpendapat partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat yang secara sukarela mengambil peran dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sedangkan Samuel P. Huntington & Joan M.Nelson dalam Budiardjo (2008) menjelaskan sifat partisipasi politik yaitu partisipasi bisa bersifat individual atau secara kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau

dengan kekerasan , legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Sementara Gabriel Almond dalam Maksud (2015) partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam mengartikulasikan kepentingannya (penyampain dukungan dan tuntutan) terhadap kebijakan pemerintah. Berbeda dengan David Roth & Frank L.Wilson dalam Budiardjo (2008) menjelaskan partipasi politik secara hierarki dalam bentuk piramida sebagai berikut:

Gambar 1. Piramida Partisipasi Politik



Sumber: Budiardjo (2008)

Berdasarkan piramida tersebut kelompok paling bawah yang jumlahnya paling banyak adalah kelompok yang sama sekali tidak terlibat dalam dan tidak melakukan kegiatan politik disebut sebagai kelompok apolitik. Kelompok atasnya a politis adalah kelompok pengamat adalah kelompok yang senangtiasa membicarakan tentang politik, mengikuti pemberitaan politik di media massa, memahami partai politik dan terlibat memberikan suara dalam pemilu. Kemudian kelompok satu tingkat diatas pengamat adalah partisipan. Kelompok partisipan adalah anggota aktif partai politik, kelompok yang terlibat langsung dalam kampanye politik dan aktif dalam kepentingan proyek sosial. Sementara kelompok yang paling atas dan sedikit jumlahnya adalah kelompok aktivis. Kelompok ini digolongkan sebagai pemimpin partai yang memilih kekuasaan dan pengaruh akses politik dan kelompok kepentingan yang terlibat penuh kepada kegiatan politik.

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang (pribadi) maupun Sekelompok orang (Masyarakat) yang secara aktif dan sadar mengikuti kegiatan politik memilih pemimpin secara langsung dan tidak langsung serta ikut terlibat dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah. Sementara partisipasi politik perempuan diartikan sebagai keikutsertaan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung dan tidak langsung ikut terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum ataupun mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Berbicara mengenai politik perempuan pada awal abad ke-20 perempuan secara umum berhasil memperoleh haknya untuk ikut ambil bagian di dunia politik secara resmi *Olympe de Gouges* saat itu mengatakan di paris commune tahun 1793

bahwa “jika seorang perempuan berhak menaiki tangga , ia juga harus berhak untuk naik ke mimbar”. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik perempuan sebagai warga negara adalah sejauh mana perempuan ikut terlibat dalam proses politik baik langsung maupun tidak langsung serta terlibat aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah khususnya dalam hal memperjuangkan kepentingan dan hak-hak kaum perempuan.

Gambaran mengenai partisipasi politik perempuan dapat dilihat pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Priandi & Roisah (2019). Penelitian ini mengkaji tentang keterwakilan perempuan di parlemen melalui kebijakan afirmasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan diparlemen mengalami fase naik turun. Pada pemilu 2009 ke 2014 terjadi penurunan yang signifikan terhadap jumlah keterwakilan perempuan. Lebih lanjut penelitian ini menegaskan bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia adalah pendidikan politik dari keluarga, mendorong perempuan untuk terlibat dalam organisasi, advokasi kaum perempuan untuk pentingnya terlibat dalam dunia politik dan yang terakhir mempersiapkan anak perempuan dari dini untuk terlibat mengenal politik. Penelitian sebelumnya berfokus pada keterwakilan perempuan diparlemen dan upaya-upaya untuk mendorong tingkat keterwakilan perempuan sementara penelitian yang dikembangkan oleh penulis berusaha mengungkapkan tipe partisipasi perempuan saat memberikan hak suaranya di TPS. berusaha mengungkapkan bagaimana kecenderungan partisipasi perempuan sebagai pemilih yang dilihat dari tiga tipologi partisipasi yaitu aktif, pasif dan golput.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Suhri Kasim (2022) yang juga mengkaji tentang pengaruh budaya patriarki pada peran politik perempuan dan pengambilan kebijakan publik di parlemen. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran politik perempuan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara secara kuantitas masih rendah. Dari 40 anggota DPRD jumlah anggota DPRD perempuan hanya 8 orang. Hal ini disebabkan karena masih dominanya budaya politik patriarki yang tercermin melalui regulasi dengan starting point 30 % untuk keterwakilan politik perempuan. Lebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa peran perempuan sebagai anggota DPRD Sulawesi Tenggara dalam proses pengambilan kebijakan sudah cukup baik namun belum maksimal karena jumlah mereka masih sedikit sehingga menempatkan laki-laki yang dominan dalam berbagai pengambilan keputusan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian sebelum mengkaji tentang adanya pengaruh budaya patriarki pada peran politik perempuan dalam proses pengambilan keputusan sementara penelitian ini berusaha mengungkapkan faktor yang dominan mempengaruhi partisipasi politik perempuan pada saat memberikan hak suaranya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lumiu (2015) tentang hal-hal yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik perempuan pada pemilu. Hasil yang digambarkan dalam penelitian ini adalah *pertama* perempuan yang memberikan hak politiknya berdasar terhadap informasi yang dia terima tentang profil partai, figur caleg, serta visi-misinya. *Kedua* terdapat perempuan yang menggunakan hak pilihnya meskipun tidak memperoleh informasi yang terkait dengan profil partai, figur caleg, serta visi-misinya. *Ketiga* terdapat pemilih perempuan yang memiliki pengetahuan dan informasi tentang proses pemilu dan figur caleg, visi-misinya dan partainya tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini karena pemilih tersebut beranggapan proses politik yang ada tidak mampu meyakinkan bahwa akan ada perubahan yang lebih baik. Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini memiliki kesamaan fokus kajian, yaitu sama-sama mengkaji partisipasi politik perempuan dalam memberikan hak politiknya namun penelitian sebelumnya tidak menegaskan tipe partisipasi politik perempuan seperti apa dalam memberikan hak politiknya sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis berusaha menggambarkan tipe politik perempuan berdasarkan pembagian tipologi partisipasi politik yaitu aktif, pasif, dan golput. Penelitian ini berusaha mengungkapkan tipe partisipasi politik perempuan berdasarkan analisis dari 3 tipe partisipasi politik.

Dari studi-studi terdahulu tergambar bahwa permasalahan utamanya hampir diseluruh daerah di Indonesia perwakilan perempuan dilembaga legislatif masih sangat sedikit. Sehingga kepentingan kaum perempuan sedikit terabaikan. Hal ini karena disebabkan karena rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam memberikan hak politiknya pada pesta demokrasi yang berlangsung. Regulasi hukum pemerintah belum mampu mengangkat keterwakilan perempuan di parlemen. Padahal UUD 1945 sebagai landasan konstitusional sudah memberikan ruang untuk setiap warga negara untuk terlibat dalam politik tanpa membedakan jenis kelamin. Kemudian dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen pemerintah menargetkan 30 persen keterwakilan perempuan. Untuk itu melalui UU No 7 Tahun (2017) tentang Pemilihan umum diharapkan mampu mendorong partisipasi politik perempuan dan mencapai target keterwakilan perempuan di parlemen. Pasal 173 ayat (2) huruf (e) menegaskan secara eksplisit bahwa menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik baik pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Namun hadirnya regulasi ini belum mampu mendorong tingkat partisipasi politik perempuan dalam memberikan hak politiknya di TPS dan mendudukan wakil perempuan. hal ini tergambar dari berbagai studi-studi terdahulu. Menurut Getrintya dalam Priandi & Roisah (2019) Semenjak Pemilihan Umum Tahun 1999 hingga Tahun 2014 Indonesia belum mencapai angka 30 Persen perempuan didalam Parlemen. Untuk itu perlu ada kajian untuk bagaimana mengenal tipe partisipasi politik perempuan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kabupaten Bombana sendiri merupakan salah satu wilayah otonom yang sampai saat ini juga termasuk wilayah yang tingkat partisipasi perempuan dalam memberikan hak suaranya masih rendah. Hal ini dapat kita saksikan pada pemilu yang baru saja diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2019. Berdasarkan data KPU Kab. Bombana jumlah masyarakat wajib pilih di mencapai kurang lebih 100.439 orang. Dengan jumlah perempuan 50.305 orang dan jumlah laki-laki 50.134 orang. Jumlah DPT dari perempuan lebih banyak dari laki-laki. DPT perempuan berjumlah 50.305 orang sedangkan dari laki-laki sebanyak 50.134. Selisih jumlah DPT antara perempuan dengan laki-laki yaitu 171. Artinya partisipasi politik perempuan sangat penting dalam proses pemilihan dan keterlibatan perempuan di lembaga legislatif untuk mewakili kepentingan perempuan menjadi hal yang penting.

Peran perempuan dalam politik didasari untuk kepentingan perempuan itu sendiri dalam rangka tampil untuk mewakili kaumnya mengambil keputusan politik yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan. Namun keterlibatan perempuan dalam politik masih sangat rendah baik ditinjau dari segi partisipasi politik sebagai peserta pemilu maupun dari segi keterwakilan perempuan di parlemen. hal ini mendorong penulis untuk mengetahui lebih dalam bagaimana perempuan menggunakan hak pilihnya dan tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Bombana. Untuk mengetahui hal tersebut penulis menggunakan pisau analisis tipe partisipasi politik menurut A.Rahman dalam Anggara, (2015) Tipe Partisipasi politik dikategorikan dalam 3 ketegori yaitu partisipasi aktif, pasif, dan Golput.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tipe partisipasi politik perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bombana. Dari permasalahan yang ada bahwa banyaknya jumlah DPT dari pemilih perempuan di bandingkan dengan DPT dari pemilih laki-laki serta tingginya angka golput dari pemilih perempuan di Kabupaten Bombana maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana tipe partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bombana. Untuk melihat tipe partisipasi politik perempuan dalam memberikan hak politiknya pada pemilihan calon legislatif di Kabupaten Bombana. penulis menganalisis berdasarkan teori A Rahman dalam Anggara (2015) yaitu partisipasi aktif, Pasif, dan Golput. Menurut A.Rahman partisipasi aktif adalah partisipasi politik perempuan dalam memberikan hak suaranya berdasarkan atas tingkat pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari figur caleg, visi-misinya, rekam jejaknya dan partainya. Sementara tipe partisipasi pasif adalah pemilih perempuan yang memperoleh informasi dan pengetahuan tentang caleg, visi-misinya, rekam jejaknya serta partainya namun dalam memberikan hak politiknya dipengaruhi oleh faktor sogokan atau sejenisnya. Sedangkan

golput adalah pemilih perempuan yang sama sekali tidak mau tahu tentang politik dan tidak memberikan hak politiknya.

METODOLOGI

Dalam melakukan penelitian tentang kajian tipe partisipasi politik perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bombana, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong (2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena dari apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan menguraikannya dalam bentuk kata-kata secara deskriptif dengan memanfaatkan metode ilmiah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bombana tepatnya di tiga (3) DAPIL yakni DAPIL I (wilayah Rumbia, Rumbia Tengah) Dapil II (wilayah Poleang Utara, Poleang Timur, Poleang Selatan, Dan Poleang Tenggara) DAPIL III (wilayah Poleang, Poleang Tengah, Poleang Barat, Dan Tontonunu) . Alasan peneliti memilih lokasi tersebut yakni karena DAPIL (daerah pemilih) itu terdapat jumlah DPT Perempuan yang lumayan banyak namun menjadi penyumbang data Golput Terbanyak pula. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU Kabupaten Bombana, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bombana, DPC Partai Politik, Pemilih perempuan di Kabupaten Bombana. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu pengamatan (*observasi*), wawancara (*Interview*), dan dokumentasi. Teknik analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiono (2014) yaitu Pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verivication*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipe Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bombana

Pemerintah menargetkan keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30 % baik di tingkatan Kabupaten/Kota, Provinsi maupun di DPR RI. Dalam rangka pencapaian target tersebut pemerintah mendorong Partisipasi perempuan masuk parlemen melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pasal 173 ayat (2) huruf (e) menegaskan secara eksplisit bahwa menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik baik pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Keterwakilan perempuan diparlemen diharapkan mampu menghasilkan iklim demokrasi yang sehat dengan memahami demokrasi semua kalangan termasuk kaum perempuan. Untuk itu dukungan dan partisipasi perempuan dalam memberikan hak politik di pemilu menjadi penting untuk dicermati. Partisipasi politik perempuan diartikan sebagai keikutsertaan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan

secara langsung dan tidak langsung ikut terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum ataupun mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik perempuan dilihat dari keikutsertaannya mengambil bagian dalam proses pemilihan legislatif di Kabupaten Bombana dari segi kuantitas cukup tinggi dari data sebagai berikut :

Tabel 1. Klasifikasi jumlah DPT (data pemilih tetap) perempuan dan laki-laki di Kabupaten Bombana tahun 2019

Dapil	Data Pemilih Tetap		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
I	8.955	9.188	18.143
II	10.729	10.797	21.526
III	12.525	12.457	24.982
IV	7.694	7.367	15.061
V	10.231	10.496	20.727
Jumlah	50.134	50.305	100.439

Sumber: KPU Bombana, 2019

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah DPT dari kaum perempuan lebih banyak dari laki-laki. DPT perempuan berjumlah 50.305 orang sedangkan dari kaum laki-laki sebanyak 50.134. selisih jumlah DPT antara perempuan dengan laki-laki yaitu 171. Menurut Closky dalam Budiardjo (2008) Partisipasi pemilih perempuan dalam mempengaruhi perolehan suara pemenang sangat potensial karena memiliki jumlah DPT yang sangat signifikan. partisipasi perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2019 dapat dilihat dari data sebagai berikut :

Tabel 2. Klasifikasi jumlah perempuan dan laki – laki yang menggunakan Hak pilih pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bombana tahun 2019

Dapil	Penggunaan Hak pilih		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
I	6.807	7.276	14.083
II	8.950	9.345	18.295
III	10.449	10.605	21.054
IV	6.621	6.311	12.932
V	7.696	8.452	16.148
Jumlah	40.523	41.989	82.152

Sumber: KPU Bombana, 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang berpartisipasi menggunakan hak pilihnya ikut terlibat dalam proses pemilihan penguasa secara langsung Closky dalam Budiardjo (2008), sebanyak 41.989 dari jumlah DPT perempuan 50.134. Berdasarkan hal ini ada sebanyak 8.316 perempuan yang tidak

berpartisipasi menggunakan hak pilihnya di TPS. Jumlah tersebut tergolong cukup tinggi dan sangat signifikan mempengaruhi perolehan jumlah kursi jika dimanfaatkan dengan baik, sedangkan jumlah perempuan yang berpartisipasi menggunakan hak pilihnya sebanyak 41.989.

Secara angka kuantitatif tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam memberikan hak politiknya untuk memilih anggota legislatif di Kabupaten Bombana cukup tinggi. Tingginya tingkat partisipasi pemilih perempuan di Kabupaten Bombana sebagian besar memilih karena adanya pengaruh money politik berupa pemberian amplop kepada pemilih perempuan menjelang hari pemilihan berlangsung. Dari beberapa informan menjelaskan bahwa keikutsertaannya memilih calon legislatif karena merasa telah mendapatkan amplop dari salah satu calon, untuk itu pemilih merasa wajib untuk memilih calon tersebut karena adanya upah yang telah didapatkan sebelumnya. Bahkan beberapa informan menjelaskan bahwa dalam kondisi hamil tua tetap datang ke TPS untuk ikut memberikan hak suaranya karena merasa telah berhutang atas pemberian amplop yang telah diberikan oleh salah satu tim sukses calon legislatif. Partisipasi pemilih perempuan di Kabupaten Bombana bukan merupakan bentuk kegiatan sukarela sebagai warga negara dalam mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa Closky dalam Budiardjo (2008) melainkan karena ada faktor materi yang menjadi dasar menentukan pilihan.

Pengaruh money politik (pemberian amplop) pada pemilih perempuan di Kabupaten Bombana rata-rata menyasar pemilih berkategori ibu rumah tangga yang tingkat pemahaman politiknya masih sangat minim. Menurut Anggara (2015) Partisipasi politik perempuan belum menumbuhkan keyakinan sebagai warga negara bahwa peran serta secara aktif akan memberikan manfaat bagi warga negara itu sendiri. Selain lemahnya pemahaman politik tingkat pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap praktik money politik (Pemberian amplop) juga yang rata-rata yang menerima tamatan SD, SMP dan SMA. Pemilih tersebut merasa berhutang jasa untuk datang ke TPS karena telah mendapatkan amplop yang diberikan oleh orang terdekatnya sendiri.

Keikutsertaan perempuan ikut aktif memberikan hak suaranya pada pemilihan anggota DPRD tahun 2019 di Kabupaten Bombana tidak di dasari oleh kesadaran politik akan pentingnya sebuah pemilihan untuk memilih wakil rakyat di DPRD selama 5 tahun ke depan sebagaimana yang diungkapkan oleh Anggara (2015) partisipasi politik adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang untuk aktif terlibat dalam proses politik. Hal ini tergambarkan dari penjelasan beberapa informan bahwa kehadiran pemilih perempuan sebagai individu tidak murni atas kesadaran pemilih untuk datang ke TPS untuk memilih wakil rakyat yang di anggap pantas melainkan karena adanya pemberian amplop menjelang pemilu.

Lemahnya kesadaran politik kaum perempuan untuk aktif terlibat didalam memilih

anggota DPRD di sebabkan karena pada dasarnya pemilih perempuan di Kabupaten Bombana memiliki tingkat pendidikan rata-rata tamatan SD, SMP dan SMA namun pemilih perempuan tetap menyadari tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pemilih perempuan paham bahwa datang ke TPS merupakan sebuah bentuk kewajiban bagi warga negara yang baik hal ini terlihat dari antusiasme pemilih perempuan cukup signifikan ikut terlibat dalam pemilihan legislatif yaitu sebanyak 41.989 namun dasar penentuan pilihannya tentang siapa yang dipilih referensi utamanya adalah siapa yang telah memberikan amplop sebelumnya tidak peduli sedang hamil tua atau jarak tempuh yang jauh. Secara kuantitas pemilih perempuan Kabupaten Bombana cukup tinggi namun secara kualitas masih sangat rendah karena dasar pilihannya tidak pada kesadaran politik melainkan melalui mobilisasi melalui pembagian amplop. Menurut Hungtinton dan Joan nelson dalam penelitiannya partisipasi yang bersifat mobilisasi (paksaan/dorongan) tertentu juga termasuk partisipasi politik.

Tipe Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Bombana jika dilihat dari pandangan A.Rahman dalam Anggara (2015) masuk dalam kategori tipe partisipasi pasif. Menurut A. Rahman dalam Anggara (2015) partisipasi politik dalam kegiatan dibedakan dari beberapa tipe yaitu pertama, partisipasi aktif adalah partisipasi yang berorientasi pada input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul, mengajukan kritik, meluruskan kebijakan dan aktif memilih pemerintah secara aktif dan sadar. Kedua, partisipasi pasif adalah partisipasi yang berorientasi kepada output. Partisipasi yang menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan keputusan pemerintah dan ikut memilih pemerintah namun didasari dari manfaat atau output yang didapatkan. Ketiga, partisipasi Golongan Putih (golput) adalah kelompok apatis dengan dunia politik karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari suatu yang dicita-citakan. Kelompok ini berpandangan ikut terlibat dalam politik atau tidak ikut dalam dunia politik itu sama saja. Sama-sama tidak akan memberikan perubahan yang nyata ke arah yang lebih baik.

Pemilih perempuan di Kabupaten Bombana jika dicermati berdasarkan pandangan A.Rahman masuk kategori Tipe partisipasi Pasif yaitu Pemilih perempuan di Kabupaten Bombana tidak didasari atas kesadaran politik yang kuat untuk pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas berdasarkan pengalaman dan pemahaman pemilih tentang objek yang dipilihnya. Pemilih perempuan lebih berorientasi kepada output yang diberikan kepada pemilih baik materi maupun non materi. Pemilih pasif adalah pemilih yang memberikan hak politiknya di TPS dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara namun dasar penentuan pilihan berdasar dari output yang diterimanya. Proses

pemberian amplop kepada pemilih perempuan di Kabupaten Bombana yang masih dilakukan khususnya bagi pemilih perempuan yang berkategori ibu rumah tangga yang memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah merupakan tipe partisipasi pasif.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya pemberian amplop yang tidak hanya di berikan kepada orang yang tidak mampu termasuk orang mampu sudah menjadi referensi utama untuk memilih. Pemilih perempuan merasa terbebani dan berhutang jika tidak memilihnya sementara sudah menerima amplop dari calon tertentu. Kesadaran yang timbul pada pemilih perempuan bukan kesadaran politik melainkan kesadaran tidak enak kepada pemberi amplop karena merasa berhutang dan terbebani. Menurut hasil wawancara pemberian amplop juga diberikan melalui orang-orang terdekat dari pemilih perempuan itu sendiri. Berdasarkan hal ini dan mengacu dari pandangan A. Rahman dalam Anggara (2015) Tipe Partisipasi pemilih perempuan di kabupaten bombana dapat digambarkan sebagai tipe partisipasi pasif yaitu partisipasi yang berorientasi kepada output yang didapatkan oleh pemilih, adapun output yang didapatkan oleh pemilih perempuan pada pemilihan legislatif berupa amplop dengan jumlah yang bervariasi.

Partisipasi politik perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bombana berdasarkan pada hasil penelitian dapat kita lihat bahwa keikutsertaan perempuan dalam memilih anggota DPRD dikarenakan adanya suatu hal berupa pemberian amplop. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi terkait dampak negatif dari *money politik* kurangnya pendidikan politik dari masyarakat itu sendiri. *Money politik* atau lebih dikenal dengan sebutan serangan fajar tidak lagi menjadi rahasia dikalangan masyarakat Kabupaten Bombana karena sudah menjadi salah satu tradisi dan strategi calon untuk meraup suara.

Partisipasi politik perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bombana jika dilihat dari tidak menggunakan hak politiknya di TPS cukup tinggi. Kabupaten bombana salah satu daerah yang berpotensi menyumbang pemilih golput dari pemilih perempuan jika dilihat dari jumlah pemilih yang tidak memberikan hak politiknya bisa di lihat dari data sebagai berikut :

Tabel 3. Pemilih Perempuan Golput/tidak memberikan hak pilih

DAPIL	DPT Perempuan		Penggunaan Hak Pilih		GOLPUT	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR
I	8.955	9.188	6.807	7.276	2.148	2.112
II	10.729	12.457	8.950	10.605	1.779	1.852
III	12.525	10.496	10.449	8.452	2.029	2.044
IV	7.694	7.367	6.621	6.311	1.073	1.056
V	10.231	10.797	7.696	9.345	2.535	1.452
Jumlah	50.134	50.305	40.523	41.989	9.611	8.516

Sumber: data diolah, 2022



Berdasarkan tabel 3 dapat kita lihat bahwa jumlah data pemilih yang tidak menggunakan hak politiknya di Kabupaten Bombana yakni 8.516 yang tersebar dari setiap dapil, jumlah pemilih perempuan yang tidak menggunakan hak politiknya terbesar berada di dapil 5 yaitu sebesar 10.797 dari pemilih perempuan. Dari setiap dapil jumlah pemilih perempuan yang tidak menggunakan hak politiknya terbesar berada di dapil 5 yaitu sebesar 10.797 dari pemilih perempuan rata-rata yang tertinggi kecuali di dapil 3 dan 4. Dari data tersebut disimpulkan bahwa tipe partisipasi pemilih perempuan berkategori golput. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih perempuan dengan sadar untuk tidak menggunakan hak pilihnya di TPS. Dari hasil wawancara dengan informan golputnya pemilih perempuan karena disebabkan oleh berbagai alasan diantaranya adalah akses jalan ke TPS yang tidak memadai karena jalanan yang berlumpur, masyarakat menilai ikut memilih dan tidak ikut memilih sama saja tidak memberikan perubahan kehidupan ke yang lebih baik, dan lebih mementingkan pekerjaannya sebagai petani alasan lain karena keterbatasan informasi yang diperoleh oleh pemilih khususnya perempuan ibu rumah tangga terkait waktu pemilihannya. Hal ini terjadi karena disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara mengingat daerah Bombana adalah daerah yang memiliki akses pedesaan yang terpencil dan beberapa desa yang berada di kepulauan yang minim informasi karena keterbatasan jaringan. Alasan ini berorientasi pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan politik di daerahnya. Hal ini terjadi karena pada pemilihan-pemilihan sebelumnya banyak harapan dan janji politik yang tidak terelaisasi seperti pembangunan jalan, bantuan bibit dan pupuk dan bantuan-bantuan lainnya yang berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat.

KESIMPULAN

Partisipasi politik perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bombana dikategorikan dalam 2 tipe partisipasi yang **pertama** Tipe Partisipasi pasif yaitu tipe pemilih yang berorientasi kepada output yang diberikan kepada pemilih baik materi maupun non materi. Proses pemberian amplop dan serangan fajar kepada pemilih perempuan di Kabupaten Bombana menjadi dasar utama dalam menentukan pilihan politiknya di TPS. **Kedua** Tipe Partisipasi GOLPUT yaitu pemilih perempuan dengan sadar untuk tidak menggunakan hak pilihnya di TPS hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran politik, lemahnya tingkat kepercayaan pemilih terhadap politik, dan minimnya akses informasi terkait waktu pemilihan khususnya pemilih perempuan yang berada di pelosok dan daerah pulau.

REFERENSI

- Anggara, S. (2015). 11. Buku Sistem Politik Indonesia.pdf. In *Sistem Politik Indonesia* (pp. 22–24).
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Building.
- Eddyono, L. H. and S. W. (2005). Pengakuan Peran Gender dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia. *LBH APIK*.
- Fuad, Z, M. (2015). Peran Pemuda relawan demokrasi dalam meningkatkan patisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 dan implikasinya terhadap ketahanan politik wilayah (studi pada relawan demokrasi Banyumas, Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21 (1).
- Lexy J. Moleong. (2007). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Lumiu, V. (2015). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Siau Barat Selatan1. *Jurnal Politico*, 4(1), 1–14.
- Maksudi, B. I. (2015). *Sistem Politik Indonesia (Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Negara, K. S. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. 182.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Revisi)*. Alfabeta.
- Suhri Kasim, S. (2022). Pengaruh Budaya Patriarki Pada Peran Politik Perempuan Dan Pengambilan Kebijakan Publik Di Parlemen. *Journal Publicuho*, 5(2), 267–276. <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.24734>
- Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tetang Pemilihan Umum